

KONTRIBUSI INDONESIA DALAM HUBUNGAN SOUTH-SOUTH COOPERATION PERIODE 2016-2018

Naufal Dzikri

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

naufal0810@gmail.com

Abstract

Indonesia as one of the developing countries that embraces free and active foreign policy, participated in the development of other developing countries in South-South Cooperation. This participation is also stated in the opening mandate of UUD 1945 to increase Indonesia's role in international development cooperation. Indonesia's contribution become an interesting topic to discuss because Indonesia is one of the development countries that are quite influential for other countries. This journal use qualitative research methods with sources of literature and former data. The results of this discussion can be seen that assistance provided by Indonesia is more in the form of services and in the form of seminar programs. This discussion will be focused on the assistance that Indonesia has provided during the presidential period Joko Widodo, especially between 2016-2018. The focus of the assistance that Indonesia provides is the Asia and Pacific countries, especially the South Pacific region. This is because there is an interest that Indonesia carries in carrying out SSC assistance for the region.

Keyword: South-South Cooperation; Indonesia; Joko Widodo

Abstrak

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang menganut politik luar negeri yang bersifat bebas dan aktif, turut serta dalam pembangunan negara berkembang lainnya dalam *South-South Cooperation*. Partisipasi ini juga seperti yang tertuang dalam amanat Pembukaan UUD 1945 untuk meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional. Kontribusi Indonesia menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memberikan kontribusi yang cukup berpengaruh bagi negara lainnya. Jurnal ini dalam pembuatannya menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersumber kepada literatur maupun data-data yang sudah ada. Hasil dari pembahasan ini dapat dilihat bahwasannya bantuan yang Indonesia berikan lebih bersifat berupa jasa dan berbentuk program-program seminar. Pembahasan ini berfokus pada bantuan yang Indonesia berikan pada masa Periode Presiden Joko Widodo, khususnya pada tahun 2016-2018. Fokus dari bantuan yang Indonesia berikan adalah negara Asia dan Pasifik khususnya kawasan Pasifik Selatan. Hal ini karena terdapat kepentingan yang Indonesia bawa dalam melakukan bantuan SSC bagi kawasan tersebut.

Kata Kunci: South-South Cooperation; Indonesia; Joko Widodo

PENDAHULUAN

Di kehidupan dunia internasional ini, pasti terdapat kesenjangan atau perbedaan di setiap negara baik perbedaan geografis maupun ekonomi. Negara di Benua Asia dan Afrika merupakan benua yang mayoritas negara berkembang atau Negara Selatan. Selama masa perang dingin, negara-negara berkembang merupakan negara jajahan dari negara-negara maju seperti Belanda, Inggris, maupun Amerika. Pada tahun 1955, Negara-Negara Asia dan Afrika yang mayoritas negara yang baru merdeka mengadakan konferensi di Bandung yang merupakan lanjutan dari Konferensi Colombo pada 1954. Konferensi Asia-Afrika memiliki tujuan memajukan kerja sama, persahabatan, hubungan antara negara-negara Afrika untuk kepentingan bersama baik dalam aspek sosial, pembangunan, dan ekonomi (Kusmayadi, 2018). Dari tujuan itu Konferensi Asia Afrika menjadi cikal bakal munculnya *South-South Cooperation* (SSC).

SSC merupakan kerja sama antara negara-negara Selatan atau negara berkembang yang fokus pada proses negara berkembang antara negara-negara berkembang. SSC didefinisikan

oleh *United Nations Office for South-South Cooperation* (UNOSSC) sebagai kerangka kerja sama dalam konteks luas, kolaborasi antara negara-negara Selatan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan teknis. Hal ini melibatkan dua atau lebih negara-negara berkembang, dapat terjadi atas dasar bilateral, regional, intraregional atau antar regional. Negara-negara berkembang berbagi keterampilan, pengetahuan, keahlian dan juga sumber daya untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan mereka. (UNOSSC, n.d.)

SSC terus mengalami perkembangan karena dalam perjalanannya SSC mendapat dukungan dari mitra pembangunan yang dikenal dengan istilah Kerja Sama Triangular atau kerja sama segitiga. Kerja sama segitiga merupakan kolaborasi antara negara-negara donor (penyumbang) dan organisasi multilateral memfasilitasi inisiatif Selatan-Selatan melalui pelatihan, penyediaan dana, manajemen dan sistem teknologi serta bentuk-bentuk dukungan lainnya (ESCAP-SSC UN, 2018). Kerja sama Triangular dapat dilihat dengan kerja sama antara negara berkembang dengan organisasi internasional atau negara maju sebagai

negara pendonor atau negara pemberi bantuan.

South-South Cooperation dibentuk ketika pasca Perang Dunia II banyak muncul negara – negara yang memerdekakan diri dan mencoba berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang independen tanpa terikat oleh pihak kolonial sebelumnya. Sebagai negara yang baru merdeka, maka negara – negara tersebut memerlukan bantuan dari negara lain yang nantinya akan berkontribusi pada kelanjutan hidup negara – negara baru tersebut. Namun sebisa mungkin mereka meminimalisir keterlibatan bantuan dari negara maju agar meskipun tetap ada bantuan dari negara maju. Hal ini tidak terjadinya ketergantungan yang berpengaruh pada ruang gerak negara berkembang itu sendiri pada saat pasca Perang Dunia II (Rachmaliani et al., 2019).

SSC sudah berkembang signifikan sejak transformasi pertama ketika terinisiasi dari konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung. Konferensi ini menjadi titik awal kerja sama negara-negara berkembang. Hubungan kerja sama antara negara-negara Selatan menjadi pelengkap hubungan negara

Selatan dan Utara. SSC mempunyai tujuan kolaborasi yang tercantum didalam Konferensi Tingkat Tinggi *Buenos Aires Plan Act tentang Kerja sama Selatan-Selatan* pada tahun 1978 untuk mempromosikan dan menerapkan kerja sama teknis di antara begara-negara berkembang dan terus berlanjut sampai pada Konferensi Tingkat Tinggi *Buenos Aires Plan Act* kedua tentang Kerja sama Selatan-Selatan pada tahun 2019. Dengan perjuangan untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan, banyak yang telah berubah dan Negara-negara Selatan kini sudah mulai muncul sebagai salah satu aktor ekonomi dunia. Negara-negara Selatan dapat saling membantu di bidang-bidang vital seperti perdagangan, keuangan, investasi, energi, lingkungan, mobilitas tenaga kerja, teknologi, perancangan strategi pembangunan dan berbagi pengalaman pembangunan yang terakumulasi selama beberapa dekade terakhir untuk saling menguntungkan. Oleh karena itu, SSC kini telah mencapai arti- penting dan kelangsungan hidup baru. (Kumar, 2018)

Dimulai dari konferensi Asia-Afrika, konferensi itu menjadi awal dari perjalanan bagi Indonesia sampai sekarang untuk berkontribusi dalam

kerja sama negara-negara selatan seperti menjadi bagian dari Negara Non-Blok pada 1961 yang mayoritas beranggotakan negara berkembang di dunia. Pada 2016 saja, melalui Politik Negeri Indonesia dalam jangka menengah atau 5 tahun sekali (2015-2019), Indonesia melakukan 51 program dalam bentuk bantuan, dukungan peralatan, program magang, kunjungan belajar, seminar, pelatihan, dan pengiriman tenaga ahli kepada negara berkembang lainnya. (Ma'ruf, 2017)

Melalui kerja sama ini, Indonesia juga membawa kepentingan politik karena kawasan Pasifik Selatan merupakan kawasan yang mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia. Karena dukungan tersebut Indonesia mengalihkan prioritas bantuan SSC nya ke kawasan Pasifik Selatan untuk mendapatkan dukungannya kembali untuk menjaga keutuhan NKRI meskipun kepentingan tersebut belum berhasil seutuhnya.

Kerangka Teoritis

Dalam wacana politik internasional, konsep 'kepentingan

nasional' umumnya digunakan dalam dua cara yang terpisah, meskipun antara keduanya saling terkait. Konsep tersebut digunakan untuk membentuk perilaku politik, dengan berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan, menentang atau mengusulkan kebijakan. Dan konsep tersebut umum sebagai alat analisis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menilai kecukupan kebijakan luar negeri suatu negara. Mendasari kedua penggunaan tersirat asumsi tentang apa yang terbaik untuk komunitas nasional, baik dalam domain domestik dan asing (Rosenau, 1968).

Konsep kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan luar negeri negara-bangsa dan mereka yang menggunakan istilah untuk membenarkan atau merasionalisasi perilaku negara di ranah internasional (Burchill, 2005).

Kepentingan luar negeri terbagi menjadi dua karakteristik yaitu secara subjektif, dan objektif. kepentingan nasional yang objektif adalah yang terkait dengan tujuan kebijakan luar negeri utama suatu negara yang terdiri dari faktor-faktor seperti geografi, sejarah, tetangga, sumber daya, ukuran

populasi dan etnis. Kepentingan nasional yang subjektif adalah kepentingan yang bergantung pada preferensi pemerintah atau elit kebijakan tertentu, termasuk ideologi, agama, dan identitas kelas. Kepentingan-kepentingan ini didasarkan pada interpretasi dan dapat berubah sewaktu pemerintah sendiri berubah (Frankel, 1970).

Dalam pelaksanaannya, kepentingan nasional harus memiliki power. Power dapat memengaruhi interaksi antara aktor. Power merupakan alat ukur suatu aktor dalam memberi pengaruh kepada aktor lainnya untuk melakukan tindakan seperti yang diharapkan oleh aktor utama. Joseph Nye memberikan dua karakter atau dua jenis dari bentuk power, yaitu hard power dan soft power. Hard power didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan seseorang melalui tindakan atau ancaman paksaan. Secara historis, hard power telah diukur dengan kriteria seperti ukuran populasi, wilayah, geografi, sumber daya alam, kekuatan militer, dan kekuatan ekonomi. Soft power bertumpu pada kemampuan untuk membentuk pola pikir orang lain tanpa menggunakan kekerasan, paksaan atau ancaman, tetapi melalui aset tidak berwujud seperti kepribadian yang

menarik, budaya, diplomasi, nilai-nilai politik, lembaga, dan kebijakan yang dipandang sah atau memiliki otoritas moral (Nye, 1999).

PEMBAHASAN

Sejarah South-South Cooperation

Kerja sama Selatan-Selatan merupakan kerangka kerja kolaborasi antara negara-negara Selatan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan teknis. Hal ini melibatkan dua atau lebih negara-negara berkembang, proses dapat terjadi atas dasar kerja sama bilateral, regional, intraregional atau antarregional. Negara-negara berkembang berbagi pengetahuan, keterampilan, keahlian dan sumber daya untuk memenuhi tujuan pembangunan mereka melalui upaya bersama (UNOSSC, n.d.).

South-South Cooperation mendapat perhatian besar sebagai filosofi untuk pengembangan selama 1960-an dan 1970-an. Tahun tersebut adalah saat-saat ketika negara-negara berkembang keluar dari penjajahan dan berjuang dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kurangnya sumber daya keuangan dan teknologi dan

apatisme Barat memaksa mereka untuk memandang kemandirian kolektif sebagai mesin pertumbuhan. Gerakan Nonblok (GNB) muncul. Inisiatif yang diambil oleh negara-negara berkembang juga mengarah pada penciptaan UNCTAD, dan Kelompok 77 pada 1960-an. Komisi Selatan dibentuk pada pertengahan 1980-an yang mengarah pada pembentukan Pusat Selatan pada awal 1990-an. Kelompok-15 negara-negara berkembang yang lebih kompak dengan KTT tahunan dibentuk pada akhir 1980-an. Selain forum tersebut, infrastruktur kelembagaan untuk mempromosikan SSC termasuk pengaturan perjanjian perdagangan preferensial antara negara-negara berkembang termasuk Perjanjian Bangkok (sekarang dinamai sebagai Perjanjian Perdagangan Asia-Pasifik) di Asia seperti di wilayah lain, dan *Global System of Trade Preferences* GSTP (Sistem Global) untuk Preferensi Perdagangan), di samping beberapa lembaga yang dibentuk untuk berkontribusi pada peningkatan kapasitas. Meskipun kapasitasnya terbatas, negara-negara berkembang mulai saling membantu. Cina membangun Kereta Api Tanzania-Zambia pada akhir 1960-an dan India,

Tribhuvan Highway di Nepal. India memulai program bantuan teknis dan ekonomi (ITEC) untuk negara-negara berkembang juga di tahun 1960-an (ESCAP-SSC UN, 2018).

Namun SSC mengalami kemunduran selama akhir 1980-an dan 1990-an, karena sejumlah besar negara berkembang menghadapi krisis keuangan dengan latar belakang menurunnya aliran sumber daya dan dipaksa untuk mendekati lembaga-lembaga Bretton woods untuk mendapatkan bantuan yang umumnya datang dengan persyaratan yang mengikat mereka dengan kuat dengan Konsensus Washington. Yang terakhir mengharuskan negara-negara peminjam untuk meliberalisasi rezim perdagangan dan investasi mereka untuk mengintegrasikan diri mereka lebih dalam dengan ekonomi dunia. Di bawah Putaran Uruguay perundingan perdagangan di bawah GATT, negara-negara berkembang juga didorong untuk mengambil komitmen besar untuk meliberalisasi rezim kebijakan perdagangan mereka. Sejumlah intervensi kebijakan yang sampai saat ini menjadi subyek pengambilan keputusan di tingkat nasional dan telah dipekerjakan secara luas oleh negara-

negara maju dalam proses pengembangan mereka sendiri berada di bawah bidang disiplin WTO seperti rezim kekayaan intelektual (IPR) atau kebijakan industri. Jadi pada tahun 1990 ketika Laporan Komisi Selatan dirilis, negara-negara berkembang digambarkan berada di pinggiran Utara atau sebagai negara yang tidak dikategorikan sebagai negara Utara atau maju, sebagian besar lemah dan tidak berdaya di arena dunia (Kumar, 2018).

Prinsip-Prinsip Panduan South-South Cooperation

Kerja sama Selatan-Selatan merupakan perwujudan solidaritas di antara orang-orang dan negara-negara Selatan yang berkontribusi pada kesejahteraan nasional mereka, kemandirian nasional dan kolektif mereka dan pencapaian tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional, termasuk Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Agenda kerja sama Selatan-Selatan dan inisiatif kerja sama Selatan-Selatan harus ditentukan oleh negara-negara Selatan, dipandu oleh prinsip-prinsip penghormatan terhadap kedaulatan nasional, kepemilikan dan kemerdekaan

nasional, kesetaraan, non-kondisionalitas, non-campur tangan dalam urusan dalam negeri dan keuntungan bersama (ESCAP-SSC UN, 2018).

Tujuan South-South Cooperation

Tujuan dasar dari kolaborasi Selatan-Selatan yang mengacu kepada *Buenos Aires Plan Act* (BAPA) untuk Mempromosikan dan Menerapkan Kerja sama Teknis di antara Negara-negara Berkembang yang didukung oleh Majelis Umum pada tahun 1978 (resolusi 33/134), adalah untuk (Organisation, 1978):

- menumbuhkan kemandirian negara-negara berkembang dengan meningkatkan kapasitas kreatif mereka untuk menemukan solusi bagi masalah pembangunan mereka sesuai dengan aspirasi, nilai, dan kebutuhan spesifik mereka sendiri;
- mempromosikan dan memperkuat kemandirian kolektif di antara negara-negara berkembang melalui pertukaran pengalaman; pengumpulan, berbagi, dan penggunaan sumber

daya teknis dan lainnya; dan pengembangan kapasitas pelengkap mereka;

- memperkuat kapasitas negara-negara berkembang untuk mengidentifikasi dan menganalisis bersama masalah-masalah utama pembangunan mereka dan merumuskan strategi yang diperlukan untuk mengatasinya;
- meningkatkan kuantitas dan meningkatkan kualitas kerja sama pembangunan internasional melalui pengumpulan kapasitas untuk meningkatkan efektivitas sumber daya yang ditujukan untuk kerja sama tersebut;
- menciptakan dan memperkuat kapasitas teknologi yang ada di negara-negara berkembang untuk meningkatkan efektivitas penggunaan kapasitas tersebut dan untuk meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang untuk menyerap dan menyesuaikan teknologi dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan spesifik mereka;
- meningkatkan dan meningkatkan komunikasi di antara negara-negara berkembang, yang mengarah ke kesadaran yang lebih

besar tentang masalah-masalah umum dan akses yang lebih luas ke pengetahuan dan pengalaman yang tersedia serta penciptaan pengetahuan baru dalam mengatasi masalah pembangunan;

- mengenali dan menanggapi masalah dan persyaratan dari negara-negara yang paling tidak berkembang, negara-negara berkembang yang terkurung daratan, negara-negara berkembang pulau kecil dan negara-negara yang paling parah terkena dampak, misalnya, bencana alam dan krisis lainnya; dan
- memungkinkan negara-negara berkembang untuk mencapai tingkat partisipasi yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi internasional dan memperluas kerja sama internasional untuk pembangunan.

South-South Cooperation di Kawasan Asia Pasifik

Kerja sama Selatan-Selatan adalah salah satu pendorong penting kerja sama regional di Asia dan Pasifik dan telah menghasilkan peningkatan volume

perdagangan Selatan-Selatan, aliran investasi langsung asing, dan transfer teknologi. Selama beberapa dekade, negara-negara Selatan telah mengumpulkan banyak keahlian, pengalaman, pelajaran dan kemampuan dalam proses pembangunan mereka sendiri, yang telah dibagikan dengan negara-negara berkembang lainnya dalam bentuk bantuan teknis. Negara-negara berkembang berpendapatan menengah, sebagai donor baru dan penyedia kerja sama teknis, telah secara signifikan mempengaruhi lanskap kerja sama Selatan-Selatan di wilayah ini dan sekitarnya. Asia-Pasifik memiliki campuran pemain kerja sama pembangunan internasional. Wilayah ini termasuk Cina dan India, kekuatan ekonomi di kawasan itu; negara-negara berpenghasilan tinggi dan penyedia ODA, seperti Australia, Jepang, Republik Korea dan Selandia Baru; dan negara-negara berpenghasilan menengah, seperti Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Singapura dan Thailand, antara lain. Jepang juga merupakan pemimpin dalam kerja sama segitiga. Di sisi lain, kawasan ini juga memiliki sejumlah besar *least developed countries* (LDC), *landlocked developing countries* (LLDC) dan *small island*

developing countries (SIDC). Keragaman tingkat pembangunan di seluruh kawasan ini memberikan peluang unik untuk kerja sama yang saling menguntungkan antara negara dan pembelajaran dari pengalaman pembangunan satu sama lain. Ini khususnya terbukti di ASEAN, di mana negara-negara bergantung pada berbagi pengetahuan dan pengalaman intra-regional. Adopsi Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan tujuan pembangunan lain yang disepakati secara internasional telah menetapkan tonggak baru bagi masyarakat internasional, termasuk PBB. Resolusi Majelis Umum PBB 71/244 mendesak sistem pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan berkonsultasi dengan semua Negara anggota, untuk semakin meningkatkan, kerja sama Selatan-Selatan yang sesuai untuk meningkatkan dampaknya dalam konteks implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Dalam melakukan hal itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa diminta untuk meningkatkan dukungannya di bidang-bidang di mana kerja sama Selatan-Selatan terbukti efektif, yaitu, pengembangan kapasitas, koordinasi kebijakan, integrasi regional, hubungan

antardaerah, interkonektivitas infrastruktur dan pengembangan kapasitas produktif nasional melalui pertukaran pengetahuan dan inovasi teknologi (UN ESCAP, n.d.).

Indonesia dalam South-South Cooperation

Keterlibatan Indonesia dalam SSC dimulai ketika Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955. Konferensi ini menjadi langkah awal kerja sama dan penguatan *Collective action* bagi negara-negara berkembang untuk mencapai kondisi yang lebih baik pada saat itu. Kerja sama bagi negara-negara berkembang ini terus mengalami transformasi dan melakukan penguatan melalui agenda setelah Konferensi Asia Afrika tahun 1955, seperti terbentuknya Gerakan Non Blok tahun 1961, Kelompok-77 pada tahun 1964, Kelompok 15 tahun 1989, South Summit di Kuba dan Qatar tahun 2000 dan 2005, Resolusi PBB No. 58/220 tentang pembentukan *High Level Committee on South-South Cooperation dan Bogota Statement: Towards Effective and Inclusive Development Partnerships* tahun 2010 (Pujayanti, 2015).

Untuk meningkatkan peran dan pengaruhnya dalam kemitraan global, Indonesia mengambil posisi sebagai aktor penting dalam partisipasi SSC. Hal ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama: konteks sejarah, politik, dan ekonomi. konstitusi telah memberikan arahan yang jelas dalam menerapkan kebijakan luar negeri yang berpartisipasi dalam penerapan tatanan dunia yang didasarkan pada kebebasan, perdamaian yang taat, dan keadilan sosial. Selain itu, Indonesia telah diakui sebagai negara berpenghasilan menengah dan merupakan anggota G20 yang menyatukan 85% dari ekonomi dunia (Tim Koordinasi Nasional KSST Indonesia, 2016).

Indonesia dalam SSC aktif berpartisipasi karena dilandasi oleh kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif sebagai bentuk implementasi dari amanat UUD 1945, yaitu turut melaksanakan ketertiban dunia. Sebagai negara berkembang pada umumnya, bantuan yang Indonesia berikan tidak berbentuk hibah uang seperti negara maju lainnya, tetapi berbentuk bantuan jasa seperti pengiriman tenaga ahli, seminar-seminar, bantuan alat-alat. Jangkauan negara-negara yang mendapat bantuan

adalah negara-negara Asia, Afrika, Pasifik, dan Amerika Latin. Palestina merupakan negara prioritas bagi Indonesia menjadi penerima bantuan. Selama masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu 2006 sampai 2014 terdapat 1.061 warga Palestina yang mendapatkan bantuan kerja sama Teknik dari Direktorat Kerja sama Teknik (Apresian, 2017). SSC merupakan manifestasi dari bentuk komitmen dan kontribusi negara Selatan terhadap pembangunan global yang dilandasi oleh prinsip solidaritas kesetaraan dan kesempatan yang sama. SSC Indonesia juga merupakan bagian implementasi bagi Indonesia dalam menjalankan program SDGs. Berbagai pengalaman didapatkan Indonesia dari pelaksanaan program SSC Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam bidang bidang tertentu. keunggulan komparatif Indonesia tersebut kemudian diformulasikan menjadi flagship program yang secara umum dikelompokkan menjadi tiga bidang utama yang didalamnya dapat dirinci kembali, yaitu (Tim Koordinasi Nasional KSST Indonesia, 2017):

1. Bidang pembangunan.
 - a. Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. Peternakan dan Pertanian;
 - c. Manajemen Risiko Bencana;
 - d. Infrastruktur;
 - e. Pendidikan.
2. Bidang tata kelola pemerintahan.
 - a. Demokrasi;
 - b. Perdamaian;
 - c. Resolusi Konflik;
 - d. Pelaksanaan Hukum;
 - e. Program Pembangunan Lokal dan Regional.
3. bidang ekonomi
 - a. Manajemen Ekonomi Makro;
 - b. Keuangan Publik;
 - c. Keuangan Mikro.

Pada masa presiden Joko Widodo, prioritas kebijakan luar negeri Indonesia mengalami perubahan. Disebutkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Indonesia periode 2015-2019 bahwa Indonesia menempatkan kebijakannya dalam isu perdamaian, peningkatan kualitas perlindungan WNI di luar negeri, lingkungan hidup, demokrasi dan HAM, serta Kerja Sama Selatan Selatan (Rachmaliani et al., 2019). Dalam kerangka (SSC), Indonesia telah memberikan bantuan teknik bagi negara-negara penerima melalui kegiatan pengiriman ahli, seminar, pelatihan, program magang, dan melakukan pemberian bantuan peralatan baik yang

dibiayai oleh dana APBN maupun kerja sama dengan berbagai mitra lainnya. Setiap tahunnya program SSC Indonesia mengalami peningkatan, tidak hanya jumlah peserta, tapi juga jumlah negara dan program kerjanya. Seperti diketahui bahwa peningkatan kapasitas dalam kerangka SSC ini adalah merupakan alat dalam diplomasi ekonomi. Indonesia juga memiliki tantangan kedepannya yaitu pentingnya untuk mengidentifikasi potensi keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia serta menetapkan prioritas bidang-bidang kerja sama dalam kerangka KSS. (Marsudi, 2015).

SSC diproyeksikan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 57 persen dari PDB dunia pada tahun 2030. Indonesia termasuk di antara sekelompok negara berkembang bersama dengan Brasil, Cina, India, Meksiko, Rusia, dan Turki. Negara-negara berkembang akan terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global. Pada tahun 2050, tujuh negara berkembang (negara-negara E7) termasuk Cina, India, Brasil, Meksiko, Rusia, Indonesia dan Turki dapat meningkatkan kontribusi PDB mereka dari sekitar 35 persen menjadi hampir 50 persen (ESCAP-SSC UN, 2018).

Implementasi Program Indonesia dalam South-South Cooperation

• Tahun 2016

Dalam periode tahun 2016, program SSC Indonesia difokuskan untuk melakukan program bantuan kepada 66 negara berkembang khususnya negara wilayah kepulauan Pasifik Selatan. Program SSC pada 2016 berkaitan dengan program isu pembangunan, isu ekonomi, dan isu tata kelola pemerintahan. Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia telah banyak terlibat dalam forum global Kerja Sama Selatan-Selatan. Keterlibatan Indonesia menghasilkan kontribusi yang nyata dalam kerja sama pembangunan internasional khususnya dibidang politik dan ekonomi. Dana yang dikeluarkan Indonesia pada tahun 2016 sebesar 15,08 Juta USD. Angka tersebut sebenarnya masih kalah dari negara lain yang menggelontorkan dana lebih besar bagi Indonesia dalam SSC ini. Kontribusi Indonesia dalam SSC lebih bersifat jasa daripada bentuk finansial. Hal ini untuk meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi seperti kurangnya keterampilan dari masyarakat dan mengurangi kemungkinan negara

penerima bantuan menjadi ketergantungan terhadap bantuan finansial yang masuk ke dalam negaranya.

Pada tahun 2016 terdapat 66 negara penerima bantuan dengan rincian 28 negara Asia, 14 negara Oceania, 15 negara Afrika, 4 negara Amerika dan Karibia, dan 5 negara Eropa. Dari 66 negara tersebut, terdapat 1.119 peserta yang berasal dari Asia sejumlah 706 sebesar peserta, Oceania sebesar 149 peserta, Afrika sebesar 228 peserta, Amerika dan Karibia sebesar 31 peserta, dan Eropa sebesar 5 peserta (Tim Koordinasi Nasional KSST Indonesia, 2016).

Selama tahun 2016 Timor Leste menjadi negara yang menerima bantuan paling banyak sebesar 15 program, diikuti oleh Fiji sebesar 14 program, Papua Nugini sebanyak 12 program, Myanmar dan Malaysia masing-masing 10 program, Bangladesh sebanyak 9 program, dan Afghanistan dan Kamboja masing-masing sebanyak 8 program. Dari data tersebut, dapat dilihat program SSC Indonesia masih dominan diterima oleh negara-negara di Kawasan Asia, yang masih memiliki cukup banyak negara berkembang (Tim Koordinasi

Nasional KSST Indonesia, 2016).

Jika kita lihat secara historisnya, sejak masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010 Kawasan Asia-Pasifik Khususnya kawasan Pasifik Selatan menjadi prioritas utama karena adanya kepentingan nasional Indonesia yaitu untuk mengatasi isu separatisme Papua dimana Kawasan Pasifik Selatan merupakan pendukung gerakan separatisme Papua (Pujayanti, 2015). Langkah Indonesia dalam mengatasi isu tersebut diharapkan bahwa dengan bantuan yang Indonesia berikan dapat mengurangi dukungan dari negara Pasifik Selatan. Isu separatisme Papua ini masih menjadi salah satu ancaman bagi kestabilan bangsa Indonesia.

Beberapa program unggulan KSST Indonesia (Ma'ruf, 2017):

- Seminar Internasional tentang Kejahatan Siber dan Forensik Digital untuk Petugas Kepolisian Palestina dan Seminar Internasional tentang Manajemen Ketertiban Umum untuk Negara-negara Asia Pasifik.
- Program Berbagi Pengetahuan untuk Manajemen Bantuan Pembangunan Resmi Mesir

(ODA).

- Entrepreneurship Boot Camp: Seminar Internasional tentang Entrepreneurship untuk Asia Pasific.
- Berbagi Praktik Terbaik dan Pengalaman tentang Perempuan dan Kepemimpinan.
- Workshop Organisasi Konferensi Islam tentang Manajemen Vaksin.

- **Tahun 2017**

Pada tahun ini, Indonesia tidak banyak melaksanakan program kegiatan SSC karena dalam tahun ini pemerintahan dan kementerian yang tergabung dalam Tim koordinasi SSC Indonesia melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pengelolaan Pemberian Bantuan Internasional yang harus selesai pada akhir tahun 2017. Beberapa program telah dilaksanakan oleh Indonesia termasuk Program Pembangunan, Tata Kelola yang Baik dan Program Ekonomi. Program bantuan tersebut meliputi pemberantasan pendidikan, kemiskinan, peternakan dan pertanian, pendidikan, manajemen risiko bencana pengembangan demokrasi, perdamaian, resolusi konflik, penegakan hukum; di

bidang ekonomi termasuk manajemen ekonomi makro, keuangan publik, keuangan mikro dan UMKM.

Setidaknya terdapat 13 program kerja sama SSC yang diikuti kurang lebih 288 peserta. Prinsip-prinsip implementasi SSC Indonesia adalah solidaritas, saling menguntungkan, komprehensif dan berkelanjutan, transparansi dan akuntabilitas dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Negara yang menjadi prioritas untuk penerima bantuan program SSC tahun ini yaitu Palestina, Afrika, Pasifik, dan Timor Leste. Bantuan untuk Palestina, Timor Leste, dan negara-negara Pasifik lain didasarkan oleh komitmen Presiden Indonesia, yaitu Joko Widodo. Sedangkan program kerja sama dengan negara Afrika adalah implementasi dari komitmen Indonesia yang dideklarasikan pada Peringatan KAA ke-60. Selain dengan negara berkembang lainnya, Indonesia juga turut melakukan kerja sama SSC dengan negara maju atau yang dikenal dengan kerja sama triangular atau segitiga. Indonesia telah melaksanakan sekitar 73 kerja sama triangular hingga tahun 2017. Pada tahun 2017, Kerja sama triangular telah dilakukan dengan berbagai negara, yaitu seperti Brazil, Meksiko, Prancis,

Jepang, dan Amerika Serikat. (Tim Koordinasi Nasional KSST Indonesia, 2017)

Perwakilan SSC Indonesia melakukan kunjungan ke Brazil pada 24-26 Mei 2017 utamanya untuk membahas mengenai finalisasi draft kerja sama teknik RI-Brazil. Kunjungan tersebut juga sekaligus menghadiri undangan perayaan ke-30 *Brazilian Cooperation Agency* (BCA). BCA merupakan badan yang mengelola program bantuan luar negeri Brasil. Program ini berfokus untuk membantu negara-negara dengan pengalaman pembangunan yang serupa dengan negaranya. Brasil menyumbang 24 persen dari total bantuannya untuk dicairkan melalui kemitraan bilateral SSC atau dengan kerja sama triangular. ABC ditugaskan untuk mengawasi konsepsi, persetujuan, pelaksanaan dan pemantauan proyek dan program. Perwakilan Indonesia mendapat kesempatan untuk melakukan pertemuan dengan Duta Besar Brasil, Joao Almino yang merupakan direktur dari perayaan *Brazilian Cooperation Agency* (BCA) (Pamasiwi & Alta, 2018).

Perwakilan Indonesia menawarkan tawaran kerja sama untuk pemanfaatan *Farmers Agricultural and Rural Training*

Center milik Indonesia di Tanzania dan Gambia. Hal ini karena Brasil memiliki banyak program dan Brasil merupakan negara yang memanfaatkan bidang pertanian. Dari pertemuan tersebut, Indonesia mengharapkan kerja sama mengenai program di bidang pertanian dan pertambangan. Hasil rangkaian kunjungan tersebut juga diharapkan dapat mempercepat proses finalisasi draft kerja sama triangular Indonesia dengan Brazil pada tahun 2017 dan meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara. Kunjungan Indonesia ini juga dalam rangka ikut berpartisipasi dalam peringatan perayaan ke-30 *Brazilian Cooperation Agency* (BCA). Dari perayaan tersebut Indonesia mendapat kesempatan untuk bertukar pikiran mengenai pengalaman pengelolaan kerja sama ini (Kemlu RI, 2017).

Selain melakukan kerja sama triangular bersama Brasil, pada tahun 2017 Indonesia melakukan kerja sama dengan negara Prancis dan Meksiko. Pada akhir November 2017, Indonesia melakukan kunjungan ke negara Prancis dan direncanakan akan bertemu dengan Kementerian Luar Negeri dan Pembangunan Internasional Prancis bagian *Directorate General for Global*

Affairs, Culture and International Developpement. Dari pertemuan tersebut akan dijelaskan mengenai pembuatan badan *Agence Francais Development* (AFD) yang berfungsi menjadi badan kerja sama yang nantinya akan memberikan bantuan dan pinjaman ke negara lain. Indonesia sebagai salah satu penerima bantuan dari badan AFD telah menerima dana bantuan untuk selama periode 2017-2021 yang akan digunakan untuk melakukan program pembangunan di berbagai bidang seperti *natural resources, sustainable urban transition, strengthening public finance, enhanced connectivity*, dan *promoting energy transition* (Tim Koordinasi Nasional KSST Indonesia, 2017).

Indonesia juga melakukan kunjungan ke negara Meksiko pada 28-30 Mei 2017. Perwakilan Indonesia akan bertemu dengan perwakilan dari *Agencia Mexicana de Cooperacion Internacional para el Desarrollo* (AMEXCID) yaitu pada bagian bidang *Head of the Department for Asia- Pacific, Deputy Director for Asia*, dan *Asia-Pacific Cooperation Program Consultant*.

AMEXCID dibentuk pada tahun 2011, AMEXCID merupakan salah satu badan Kementerian Luar Negeri

Meksiko. Misi adalah untuk bekerja sama dan berbagi yang terbaik dari Meksiko untuk dunia luar menghadapi tantangan global dan tumbuh bersama. Bidang prioritas dari kerja sama pembangunan Meksiko adalah pendidikan, kesehatan, lingkungan dan perubahan iklim, dan sains dan teknologi. Prioritas geografis adalah Amerika Tengah; sisanya dari Amerika Latin dan Karibia; dan negara-negara berkembang di Asia-Pasifik dan Afrika (fundit, 2011).

AMEXCID bagian Deputy Director for Asia melakukan penawaran kerja sama dengan Indonesia dibidang kesehatan, yaitu pencegahan demam berdarah di Amerika Selatan. Sementara itu, Indonesia menawarkan kerja sama dalam penanggulangan bencana negara-negara Amerika Selatan. Selain itu perwakilan Indonesia melakukan kerjasama di bidang olahraga.

- **Tahun 2018**

Selama tahun 2018, Indonesia melaksanakan serangkaian seminar dan kegiatan dalam rangka program SSC di tahu tersebut. Program tersebut dalam rangka meningkatkan citra positif

Indonesia di dunia internasional dan juga melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional. Kementerian Luar Negeri berhasil menyelenggarakan 14 (empat-belas) bantuan teknis dalam bentuk program peningkatan kapasitas (pelatihan dan seminar) yang diikuti oleh 384 peserta dari 53 negara berkembang di kawasan Asia, Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika Tengah, Karibia, dan Eropa Timur di dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan. (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2018)

- a) Seminar Internasional tentang Keuangan Mikro untuk Palestina, Amman, Yordania, 25-29 Maret 2018;
- b) Seminar Internasional tentang Manajemen Risiko Bencana untuk Negara-negara di Wilayah Pasifik, Afrika, Eropa, Amerika Selatan dan Karibia, Banda Aceh, NAD, 16-25 April 2018;
- c) Pelatihan Internasional tentang Pemberdayaan UKM untuk Negara-negara Asia dan Pasifik, Bandung dan Jakarta, 22 April - 1 Mei 2018;
- d) Pelatihan Internasional tentang Akuakultur untuk Negara-negara Afrika, Banyuwangi, Jawa Timur, 15-21 Juli 2018;
- e) Pelatihan Internasional Perikanan untuk Negara-negara Asia Pasifik, Banyuwangi, Jawa Timur, 15-21 Juli 2018;
- f) Seminar Internasional tentang Infrastruktur untuk Afghanistan: Berbagi Praktik Terbaik untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); Tangerang, Banten, 26 Agustus - 1 September 2018;
- g) Pelatihan Internasional tentang Teknologi Pengolahan Produk Pertanian dan Peternakan untuk Negara-negara Afrika: Berbagi Praktik Terbaik untuk Mencapai SDGs, Malang dan Batu, Jawa Timur, 1-10 September 2018;
- h) Pelatihan Pemberdayaan Pemuda dan Wanita untuk Komunitas Perbatasan di Indonesia dan Papua Nugini, Jayapura, Papua, 28 Oktober - 1 November 2018;
- i) Pengiriman Pakar untuk Pelatihan Kerajinan Tempurung Kelapa dalam Berkontribusi pada Agenda SDGs Global, Belize City, Belize, 5-9 November 2018;

- j) Seminar Internasional tentang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Palestina dan Yordania: Bekerja Sama untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), Amman, Yordania, 17-21 November 2018;
- k) Pengiriman Ahli Kesehatan dan Bantuan Medis untuk Timor Leste, Dili, Timor-Leste, 18-23 November 2018;
- l) Workshop Manajemen Konferensi Internasional untuk Gambia: Kemitraan dalam Pencapaian SDGs, Banjul, Gambia, 27-30 November 2018;
- m) Pengiriman Ahli Pertanian untuk Myanmar, Yangon, Myanmar, 6-11 Desember 2018;
- n) Seminar Internasional tentang Kewirausahaan Sosial Muda: Mencapai SDGs melalui Ekonomi Kreatif, Jayapura, Papua, 11 Desember 2018

Kepentingan Nasional Indonesia

Bantuan yang Indonesia berikan selama ini kita ketahui negara Pasifik Selatan merupakan salah satu prioritas utamanya. Jika kita tarik melalui

demografis, negara-negara kawasan Pasifik Selatan memiliki etnis yang sama dengan kawasan Indonesia bagian Timur, yaitu Papua. Hal inilah yang membuat Pasifik Selatan mendukung gerakan separatisme Papua, yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM berusaha untuk mendapatkan dukungan dari dua organisasi di kawasan Pasifik Selatan, yaitu Pacific Island Forum (PIF) dan Melanesian Spearhead Group (MSG). Masalah HAM adalah kasus yang selalu dibawa oleh Pasifik Selatan untuk mendukung keberadaan gerakan separatisme Papua dan tidak mendukung pemerintahan Indonesia. Dari permasalahan tersebut pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono arah prioritas SSC yang awalnya adalah negara Afrika menjadi negara Pasifik yang diharapkan untuk meredakan dukungan bagi OPM dan Indonesia mendapatkan simpati di mata negara-negara Pasifik.

Negara anggota MSG yang memiliki kesamaan identitas dengan Papua mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia karena mereka menganggap banyak pelanggaran HAM yang terjadi disana. Mereka mendukung hak dari rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri. Vanuatu merupakan salah

satu negara yang paling sering menyuarakan kemerdekaan Papua. Perdana Menteri Vanuatu, dalam Sidang Tahunan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa Swiss pada Maret 2014, mengatakan hingga kini masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua. Vanuatu merupakan negara yang menganut konsep “Melanesia Socialism”. Konsep tersebut merupakan ideologi sosialisme yang dianggap cocok untuk ras Melanesia, karena mendukung kepemilikan bersama daripada kepemilikan individual. Dalam pelaksanaannya ideologi ini mendorong bersatunya negara-negara Ras Melanesia untuk membentuk pemerintahan sendiri, seperti yang ia lakukan dalam menyerukan kemerdekaan Papua. Dari sini terlihat sejarah dan identitas membentuk konstruksi kebijakan luar negeri negara anggota MSG.

Dari pernyataan diatas, Indonesia melalui program SSC melaksanakan *flagship program* yang salah satunya ditujukan untuk kawasan Pasifik yaitu *Entrepreneur BootCamp: International Workshop On Entrepreneurship For Asia Pacific* (Tim Koordinasi Nasional KSST Indonesia, 2017). Program tersebut merupakan program bantuan seminar bagi negara Pasifik Program

yang melibatkan 27 peserta untuk menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Program ini merupakan program yang berkelanjutan yang nantinya diharapkan akan meningkatkan kapasitas wirausaha dari negara peserta untuk menjawab tantangan kebutuhan di masa depan.

Kemampuan diplomasi yang Indonesia lakukan akan menentukan keberhasilan bagi Indonesia untuk meredam isu Papua merdeka di Pasifik Selatan. Indonesia harus dapat membuat kebijakan negara Pasifik Selatan untuk mendukung keutuhan NKRI (Pujayanti, 2015). Pada tahun 2018, Indonesia melaksanakan pertemuan mengenai Penetapan Batas Maritim Indonesia bersama negara Palau, Vietnam, Filipina, India dan Singapura. Indonesia berhasil mendapatkan dukungan mengenai kelompok Separatis Papua. Keberhasilan ini antara lain dengan meningkatnya dukungan dari negara-negara Pasifik kepada NKRI bantuan untuk mencegah pengaruh dari kelompok separatisme Papua kepada negara-negara Pasifik yang lain. Selain itu Indonesia juga terus meningkatkan hubungan diplomatiknya dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Pemerintah mengklaim negara di kawasan itu dapat

menjadi pasar untuk produk manufaktur, perikanan dan jasa-jasa asal RI. Dalam Laporan Kinerja (LKJ) Kemenlu RI 2018 Indonesia berhasil meningkatkan dukungan dari negara-negara Pasifik untuk menjaga keutuhan NKRI yang merupakan salah satu dari upaya Kemenlu RI untuk mencegah upaya kelompok separatisme Papua. (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2018). Maka dari itu Pasifik Selatan menjadi prioritas bagi program SSC Indonesia.

KESIMPULAN

Tulisan ini membahas bagaimana kontribusi Indonesia dalam SSC bagi negara berkembang lainnya pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo khususnya pada periode 2016-2018. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri RI periode 2015-2019, Indonesia menempatkan kebijakannya dalam isu perdamaian, peningkatan kualitas perlindungan WNI di luar negeri, lingkungan hidup, demokrasi dan HAM, serta Kerja Sama Selatan Selatan (SSC). SSC merupakan kerangka kerja kolaborasi antara negara-negara Selatan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan

teknis. Hal ini melibatkan dua atau lebih negara-negara berkembang, proses dapat terjadi atas dasar kerja sama bilateral, regional, intraregional atau antar regional.

Kontribusi Indonesia dalam SSC lebih bersifat bantuan jasa daripada bantuan keuangan untuk meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi seperti kurangnya keterampilan dari masyarakat dan mengurangi kemungkinan negara penerima bantuan menjadi ketergantungan terhadap bantuan finansial yang masuk ke dalam negaranya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 Indonesia melakukan 51 program kerja yang mayoritas bersifat jasa dengan negara prioritas berasal dari Asia. Asia masih menjadi prioritas khususnya kawasan Pasifik Selatan karena adanya kepentingan nasional Indonesia untuk mengatasi isu separatisme Papua dimana Kawasan Pasifik Selatan merupakan pendukung gerakan separatisme Papua. Secara demografis beberapa etnis dari Indonesia Timur merupakan bagian dari Pasifik Selatan. Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menjadikan kawasan Pasifik Selatan sebagai tempat untuk menyuarakan dan mencari dukungan untuk memerdekakan Papua dari NKRI.

Hal itulah yang ingin dibendung oleh Indonesia. Pada tahun 2018, Indonesia melakukan 14 bantuan teknis dalam bentuk program peningkatan kapasitas (pelatihan dan seminar) yang diikuti oleh 384 peserta dari 53 negara berkembang di kawasan Asia, Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika Tengah, Karibia, dan Eropa Timur di dalam kerangka *South-South Cooperation*.

Indonesia juga terus mengembangkan tingkat kerja sama di kawasan Pasifik dalam rangka mengurangi isu separatisme Papua yang berkembang di kawasan Pasifik dan menjaga kedaulatan NKRI.

REFERENSI

Book

Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. London: Palgrave Macmillan.

Frankel, J. (1970). *National Interest*. London: Pall Mall Press Ltd

Journal

Apresian, S. R. (2017). Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular Sebagai Instrumen Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Global. *Jurnal Ilmiah Hubungan*

Internasional Vol 12 No 2, 189-203.

Kusmayadi, Y. (2008). Pengaruh Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 Terhadap kemerdekaan Negara-Negara di Benua Afrika. *JURNAL AGASTYA VOL.08 NO. 01*, 15-34.

Pujayanti, A. (2015). Kerja Sama Selatan-Selatan dan Manfaatnya Bagi Indonesia. *Jurnal Politica Vol 6 No 1*, 63-86.

Rachmaliani, A., Rachmawaty, A., & Rizaldi, A. (2019). DAMPAK BANTUAN INDONESIA TERHADAP NEGARA ANGGOTA KERJA SAMA SELATAN-SELATAN DI KAWASAN ASIA. *Jurnal MANDALA Vol 2 No 1*, 80-95.

Nye, J. (1999). Redefining the National Interest. *Foreign Affairs*, Vol. 78, No. 4, 22-35.

Rosenau, J. (1968). National interest. *International encyclopedia of the social sciences* 11, 34-40.

Report

ESCAP-SSC UN. (2018, Juni 21). *South-South Cooperation in Asia and The Pacific – A brief Overview*. from unescap.org: https://www.unescap.org/sites/default/files/SSC_Paper_v04_20180621_FINAL_formatted.pdf

Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2018). *Laporan Kinerja*. Jakarta:

- Kementerian Luar Negeri Indonesia.
- Organisation, U. N.-U. (1978). *The Buenos Aires Plan of Action*. Buenos Aires: United Nations.
- Tim Koordinasi Nasional KSST Indonesia. (2016). *Laporan Tahunan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia*. Jakarta: Tim Koordinasi Nasional KSST Indonesia.
- Kumar, N. (2009). *South-South and Triangular Cooperation in Asia-Pacific: Towards a new paradigm in development cooperation*. Bangkok: UNESCAP Working Paper (No. WP/09/050).
- Marsudi, R. (2015). *Renstra Kemenlu 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Indonesia.
- Tim Koordinasi Nasional KSST Indonesia. (2017). *Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia*. Jakarta: Tim Koordinasi Nasional KSST Indonesia.
- Pamasiwi, R. M., & Alta, A. (2018). *Indonesian South-South Cooperation: Stepping Up the Institution and Strategy for Indonesia's Development Assistance*. Depok: LPEM FEB UI.
- Ma'ruf, I. H. (2017, November 08). *South-South Cooperation: Menganalogikan Indonesia sebagai Mahluk Berbudi*. Retrieved Maret 16, 2020, from goodnewsfromindonesia.id: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/11/08/south-south-cooperation-menganalogikan-indonesia-sebagai-mahluk-berbudi>
- UN ESCAP. (n.d.). *South-South Cooperation*. Retrieved from unescap.org: <https://www.unescap.org/south-south-cooperation>
- UNOSSC. (n.d.). *About South-South and Triangular Cooperation*. Retrieved Maret 16, 2020, from unsouthsouth.org: <https://www.unsouthsouth.org/about/about-sstc/>
- fundit. (2011). *fundit.fr*. Retrieved from Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID): <https://fundit.fr/en/institutions/agencia-mexicana-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-amexcid#:~:text=Created%20in%202011%2C%20the%20Mexican,change%2C%20and%20science%20and%20technology.>
- Kemlu RI. (2017, Desember). *Buletin Jendela*. Retrieved from kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9NYWphbGFoL0J1bGV0>

Website

aW4gSmVuZGVsYS9CdWxldGl
uIEplbmRlbGEgNiAtIDYgRGVz
ZW1iZXIzMjAxNy5wZGY%3D